

Pierre Rosanvallon

*Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity,
Proximity,*

Translated by Arthur Goldhammer,
Princeton: Princeton University Press, (2011), 2015,
235 hlm.



Sejak 2001 *Collège de France*, lembaga pendidikan tinggi Prancis paling bergengsi yang berisi para filsuf dan pemikir terkenal dari berbagai bidang, menginisiasi munculnya sebuah fakultas baru. *Modern and Contemporary History of the Political* adalah nama fakultas baru tersebut. Pierre Rosanvallon, seorang ahli filsafat politik dan penulis buku yang produktif, didaulat sebagai Guru Besar untuk yang pertama kali dan masih menjabat hingga saat ini.

Nama fakultas tersebut rupanya sejalan dengan perkembangan termutakhir dalam kajian filsafat politik, yaitu penelaahan kembali asas-asas politik demokratis dalam masyarakat yang heterogen dan plural, bangsa-bangsa yang semakin melintas batas, negara yang tidak lagi digerakkan oleh ideologi-ideologi besar, dunia yang semakin terhubung, serta kecenderungan konflik yang semakin acak menyebar. Perkembangan dalam kajian filsafat politik ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebab telah dimulai sejak periode 1980-an oleh beberapa tokoh kunci dalam filsafat politik, seperti Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Claude Lefort, dan Leo Strauss. Pada umumnya, para ahli filsafat politik tersebut menghidupkan kembali pemikiran Carl Schmitt, seorang pakar hukum dan ahli politik di Republik Weimar, Jerman mengenai *Das Politische* (Yang Politis/*The Political*) sebagai dasar penggerak politik yang selalu konfrontatif, konflikual, agonistik, dan senantiasa mengelak dari prosedur-prosedur rasional demokratis.

Pierre Rosanvallon berada di dalam satu barisan para pemikir kontemporer tersebut, barisan yang kini dikenal dengan nama para pemikir *post-foundational*. Sebelum menerbitkan buku *Democratic Legitimacy*, Rosanvallon telah menerbitkan beberapa karya monumental

dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti *L'âge de l'autogestion* (1976), *Le capitalisme utopique* (1979), *Le nouvel âge des inégalités* (1996), dan *La contre-democratie* (2006). Buku *Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity*, merupakan kelanjutan dari karya-karya awalnya sekaligus pendalaman dari buku terakhirnya *Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust* (2008).

Tema pokok yang hendak diangkat Rosanvallon sesungguhnya sederhana, yaitu praktik demokrasi yang dipraktikkan saat ini berdiri di atas ketidaksejajaran (*asymmetry*) antara 1) kondisi-kondisi sosial-politik yang telah berubah secara drastis dan 2) institusi-institusi demokrasi yang masih mengikuti gambaran ideal di abad ke-18 dan 19. Ketidaksejajaran ini memunculkan persoalan yang tidak sederhana dengan konsekuensi gawat, seperti munculnya ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi demokrasi, ketidakcakapan birokrasi, ketidaklayakan aturan perundang-undangan, dan tentu saja munculnya populisme massa sebagai arus balik demokrasi. Ringkasnya, demokrasi saat ini berdiri di atas dasar legitimasi yang tidak lagi legitim. Dalam rangka memperkuat fondasi sekaligus praktik demokrasi, Rosanvallon melihat pentingnya upaya penelaahan kembali terhadap fondasi demokrasi dan pergeseran-pergeseran paradigma yang terjadi di abad ke-20 dan 21.

Terdiri dari 12 Bab dan 1 Bab kesimpulan, buku 235 halaman ini diawali dengan satu Bab Pengantar provokatif berjudul *the Decentering of Democracies*. Rupanya tema besar dalam filsafat kontemporer pasca-fenomenologi mengenai *Decentering Subject* berjalan sejajar dengan tema utama filsafat politik mengenai *Decentering Democracy*. Konsep manusia sebagai subjek yang berdaulat dan otonom sebagaimana Kant sejak fenomenologi Edmund Husserl telah terfragmentasi menjadi subjek yang "selalu tak cukup-diri," mengalami diri melalui arus penghayatan waktu (*Erlebnisstrom*) yang kontingen dan terputus-putus dalam patahan-patahan ingatan, sejarah, dan pemahaman-diri.

Subjek telah terpelanting keluar dari takhtanya sebagai *ego cogito*. Bersamaan dengan subjek yang terpelanting keluar dari takhtanya ini

muncul persoalan mengenai legitimasi keberadaan manusia sebagai subjek. Persoalan mengenai dasar legitimasi tersebut terjadi juga di dalam wilayah politik mengenai kekuasaan dan demokrasi. Jika Edmund Husserl menjawab persoalan legitimasi keberadaan manusia melalui momen-momen konstitusi-diri subjek, Pierre Rosanvallon menjawab persoalan perihal legitimasi demokrasi melalui momen-momen konstitutif bagi demokrasi kontemporer yang meliputi kesadaran akan *imparsialitas* tatanan hukum, *refleksivitas* tatanan birokrasi yang mewakili kepentingan segala golongan, dan *proximitas* keadilan tatanan masyarakat dalam mengakomodasi kelompok-kelompok minoritas.

Ketiga momen konstitutif demokrasi tersebut membedakan praktik demokrasi kontemporer dengan demokrasi modern di abad ke-18 dan 19 yang semata mengandaikan kesejajaran ideal antara *prinsip* kehendak umum mayoritas di tingkat konsep dan *teknik* pengambilan keputusan/kebijakan politis di tingkat praktik. Praktik demokrasi kontemporer *de facto* dilaksanakan di atas kesadaran bahwa kesejajaran ideal tersebut adalah fiksi yang diperlukan dalam rangka penyederhanaan praktik politik dan pengelolaan keberagaman tatanan. Namun persoalan muncul dalam praktik demokrasi kontemporer saat prinsip kesejajaran ideal tersebut *de jure* dijadikan sebagai realitas konkrit-riil. Padahal, dalam masyarakat kontemporer abad ke-21 konsep “kehendak umum” dan “mayoritas” tidak lagi bersifat homogen dan tunggal. Rosanvallon menyatakan:

Istilah “rakyat” (*the people*) tidak lagi dapat dipahami sebagai massa homogen. Konsep “rakyat” itu sendiri kini lebih dirasakan sebagai rangkaian patahan sejarah yang terakumulasi dalam situasi-situasi spesifik. Maka masyarakat kini justru terus-menerus mendefinisikan diri mereka sebagai minoritas, yang tidak lagi ditandai oleh konsep penjumlahan sebagai “jumlah terkecil dari seluruh masyarakat.” Istilah minoritas itu sendiri telah mengambil perubahan arti sebagai rangkaian ekspresi sosial yang berbeda-beda satu sama lain. Masyarakat saat ini telah mewujudkan diri sebagai litani minoritas. Rakyat telah bergeser arti menjadi pluralitas minoritas.” (hlm. 4)

Pergeseran pemahaman masyarakat kontemporer dalam memahami dirinya membawa pada pergeseran konsep legitimasi politik. Dalam istilah Rosanvallon, demokrasi yang ditandai oleh minoritas plural yang konfliktual dan agonistik itu membawa pada *a radical pluralization of the forms of legitimacy* (hlm. 8). Maka tidak ada satu pun arus utama aliran politik, seperti misalnya demokrasi liberal, marxisme, sosialisme, dll, yang dapat menjadi jawaban tunggal atas persoalan yang kompleks itu.

Masalahnya, praktik demokrasi kontemporer belum dapat beranjak dari bayang-bayang arus utama aliran-aliran politik abad ke-19 (hlm. 152 - 153). Bahkan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas misalnya, bagi Rosanvallon, masih terjebak ke dalam pandangan mengenai kedaulatan rakyat yang bersifat homogen dan monistik. Akibatnya, teori tindakan komunikatif Habermas bergeser arti menjadi proseduralisme politik yang mengaburkan perbedaan dasar antara prinsip ideal kepentingan publik dan teknik politik pengambilan kebijakan politik untuk segelintir golongan.

Kesenjangan antara prinsip ideal demokrasi dan teknik politik perebutan kekuasaan inilah yang memunculkan apa yang oleh Rosanvallon disebut sebagai gerakan-gerakan *counter-democracy*. Kontra-demokrasi merupakan gerakan-gerakan "minoritas" di dalam tubuh demokrasi yang berusaha menjawab kontradiksi-kontradiksi internal dalam demokrasi, yaitu: 1) kontradiksi antara dasar legitimasi demokrasi sebagai konsensus publik dan fakta dissensus di dalam institusi-institusi demokrasi, 2) kontradiksi antara kepercayaan (*trust*) terhadap prinsip kehendak umum dan fakta ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap mekanisme elektoral-representatif. Dalam pemahaman Rosanvallon, yang sering luput adalah kenyataan bahwa gerakan-gerakan kontra-demokrasi selalu mendua arti atau ambigu. Di satu sisi gerakan-gerakan tersebut menciptakan berbagai terobosan dari dalam tatanan demokrasi melalui terciptanya lembaga-lembaga baru non-ortodoks yang memperkuat prinsip imparialitas, reflektivitas, dan proximitas keadilan. Di sisi lain, gerakan-gerakan tersebut, jika tidak mampu diakomodasi secara tepat, justru dapat meluluh-lantakkan demokrasi dari dalam dan meng-

geser demokrasi ke dalam tirani. Gejala populisme massal dan fundamentalisme agama adalah beberapa contoh kecil yang dapat disebut.

Sebagai sebuah karya filsafat politik, *Democratic Legitimacy* memiliki tujuan praktis yang dirumuskan secara jelas. Maka buku ini juga memuat beberapa kemungkinan solusi dan resolusi atas kontradiksi-kontradiksi internal demokrasi seperti misalnya re-institusionalisasi lembaga-lembaga demokrasi. Untuk Indonesia yang sedang bergumul dengan demokrasi, sistem kepartaian, otonomi daerah, serta munculnya persoalan-persoalan seperti fundamentalisme agama, korupsi, inefisiensi birokrasi, dan sebagainya, buku *Democratic Legitimacy* merupakan buku yang wajib dibaca oleh para ahli filsafat, para politisi, para penasihat penguasa, dan penyelenggara negara serta pengambil kebijakan.

Democratic Legitimacy mampu menjelaskan dengan *kalem* berbagai persoalan yang acapkali dipeributkan dalam politik nasional/lokal kita, sekaligus memberikan kerangka pemahaman yang solid dan jelas mengenai arah demokrasi untuk 50 tahun ke depan. (*Ito Prajna-Nugroho*, alumnus Program Sarjana dan Pasca-Sarjana STF Driyarkara)